

IMLPEMENTASI KETAHANAN WILAYAH PERBATASAN DAN PULAU-PULAU TERLUAR DALAM RANGKA MENEGAKKAN KEDAULATAN NEGARA

Dwi Joko Siswanto¹

Prodi Manajemen Pertahanan Akademi Militer
dwijokoakmil@manajemenhan.akmil.ac.id

Gatot Subagya²

Prodi Manajemen Pertahanan Akademi Militer
gatotsubagyo71@gmail.com

Agustin Nurhandayani³

Prodi Manajemen Pertahanan Akademi Militer
agustinnurhandayani@manajemenhan.akmil.ac.id

Herdin Yudha Puspita⁴

Prodi Manajemen Pertahanan Akademi Militer
herdinyudha@manajemenhan.akmil.ac.id

Agus marwanto⁵

Prodi Manajemen Pertahanan Akademi Militer
Marwantoagus961@gmail.com

Muhammad Fachry Rizky⁶

Prodi Manajemen Pertahanan Akademi Militer
rfachry235@gmail.com

Mardhendi Beriasta Ginting⁷

Prodi Manajemen Pertahanan Akademi Militer
hendiginting98@gmail.com

ABSTRAK

Pembangunan di wilayah perbatasan dan pulau-pulau terluar sangat signifikan, mengingat wilayah perbatasan, memiliki potensi sumber daya alam yang cukup besar, merupakan wilayah yang sangat strategis bagi pertahanan keamanan negara serta dapat dijadikan benteng pengaman yang berada di pintu terdepan wilayah NKRI, namun pada kenyataannya pembangunan wilayah perbatasan, khususnya Kabupaten Kepulauan Tanimbar, yang dapat dilaksanakan oleh pemerintah dan TNI AD dalam meningkatkan ketahanan wilayah sehingga wilayah perbatasan dan pulau-pulau terluar di wilayah Kodim 1507/ Saumlaki, dapat menjadi “beranda terdepan” negara Republik Indonesia. Dalam tulisan ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, dengan pendekatan kepustakaan. Untuk menganalisis data yang ada dalam membangun konsep strategi menggunakan Metode Analisis SWOT. Strategi yang dapat dilakukan untuk membangun ketahanan wilayah perbatasan meliputi penyusunan RT/RW yang menjangkau wilayah perbatasan negara, peningkatan kualitas sumber daya manusia, membangun sarana dan prasarana, mendekatkan gelar satuan TNI AD ke wilayah perbatasan dan memberdayakan pos-pos pengamanan perbatasan untuk membantu pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kata Kunci: Implementasi, Ketahanan Wilayah, Perbatasan Pulau-Pulau Terluar.

ABSTRACT

Development in border areas and outer islands is very significant, considering that the border area, has considerable natural resource potential, is a very strategic area for the defence of state security and can be used as a security fortress at the front door of the territory of the Republic of Indonesia, but in reality the development of border areas, especially the Tanimbar Islands Regency, which can be implemented by the government and the Army in increasing regional resilience so that border areas and outer islands in the 1507 / Saumlaki Kodim area, can become the ‘front porch’ of the Republic of Indonesia. This paper uses a qualitative descriptive method, with a literature approach. To analyse existing data in building a strategy concept using the SWOT Analysis Method. Strategies that can be carried out to build the resilience of border areas include the preparation of RT / RW that reach the border areas of the country, improving the quality of human resources, building facilities and infrastructure, bringing the title of Army units closer to the border area and empowering border security posts to assist local governments in improving community welfare.

Keywords: Implementation, Regional Resilience, Border Outer Islands



LATAR BELAKANG

Sebagai negara yang berbatasan langsung dengan beberapa negara tentunya akan membawa permasalahan tersendiri bagi bangsa Indonesia yang akan semakin berkembang bila dikaitkan dengan kenyataan bahwa bangsa Indonesia terletak di posisi strategis baik secara Geostrategis maupun secara Geopolitik yang dapat berdampak pada keamanan, kesejahteraan, pertumbuhan penduduk, kemajuan ekonomi, terutama terhadap kedaulatan bangsa dan negara. Dampak globalisasi ini selain menimbulkan peluang yang dapat dimanfaatkan untuk kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara, tapi juga dapat menimbulkan banyak permasalahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara apabila tidak segera di cermati dan diantisipasi. Apalagi bila dihadapkan pada kondisi negara Kesatuan Republik Indonesia yang merupakan negara kepulauan (*archipelagic state*) dengan 17.508 pulau dan berbatasan dengan beberapa negara tetangga baik perbatasan laut maupun darat. Di wilayah darat Indonesia berbatasan dengan 3 negara, yaitu Malaysia, Papua New Guinea dan Timor Leste, sedangkan di laut berbatasan dengan 10 negara, yaitu India, Thailand, Malaysia, Singapura, Vietnam, Filipina, Palau, Papua New Guinea, Australia dan Timor Leste tentunya permasalahan yang timbul akan banyak. Sebagai negara yang berbatasan langsung dengan beberapa negara tentunya akan membawa permasalahan tersendiri bagi bangsa Indonesia yang akan semakin berkembang bila dikaitkan dengan kenyataan bahwa bangsa Indonesia terletak di posisi strategis baik secara Geostrategis maupun secara Geopolitik yang dapat berdampak pada keamanan, kesejahteraan, pertumbuhan penduduk, kemajuan ekonomi, terutama terhadap kedaulatan bangsa dan negara.

Dampak yang ditimbulkan akibat arus globalisasi telah menimbulkan adanya tuntutan perubahan dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara apalagi bila dihadapkan pada kondisi strategis negara Indonesia yang berbatasan langsung dengan negara lain membutuhkan orientasi yang tepat dalam pembangunan bangsa. Tuntutan orientasi perubahan pembangunan ini seringkali bertentangan dan tidak sejalan dengan paradigma nasional yang dijadikan landasan pembangunan nasional baik Pancasila sebagai landasan Ideologi negara maupun UUD 1945 sebagai landasan Konstitusi. Perubahan orientasi pembangunan yang diinginkan banyak pihak sering dimanfaatkan oleh segelintir orang untuk kepentingan pribadi atau pun masuknya pengaruh-pengaruh asing yang berdampak pada hancurnya nilai-nilai budaya dan jiwa nasionalisme masyarakat terutama masyarakat yang berada di wilayah perbatasan dan pulau-pulau terdepan.

Pembangunan di wilayah perbatasan dan pulau-pulau terdepan mempunyai makna penting, mengingat wilayah perbatasan, memiliki potensi sumber daya alam yang cukup besar merupakan wilayah yang sangat strategis bagi pertahanan keamanan negara serta dapat dijadikan benteng pengaman yang berada di serambi terdepan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Propinsi Maluku merupakan salah satu Propinsi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berbatasan langsung dengan negara Timor Leste, Australia dan memiliki banyak pulau terdepan. Penanganan wilayah tersebut pada hakekatnya merupakan bagian dari upaya perwujudan wilayah nusantara sebagai satu kesatuan geografi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Sekaligus merupakan manifestasi kedaulatan wilayah yang mempunyai peranan penting dalam penentuan batas wilayah kedaulatan, pemanfaatan sumber daya alam, menjaga keamanan dan integritas wilayah. Pembangunan atau pengelolannya harus didekati melalui dua aspek secara seimbang, yaitu pendekatan kesejahteraan dan pendekatan keamanan. Ketahanan wilayah perbatasan dan pulau-pulau terdepan mempunyai nilai strategis sehingga perlu mendapatkan perhatian secara sungguh-sungguh karena kondisi tersebut akan mendukung terciptanya Ketahanan Nasional dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keberhasilan pembangunan ketahanan nasional di wilayah perbatasan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang rentang jarak dan hambatan geografis dapat diatasi dengan perkembangan Iptek dan sistem transportasi yang memadai. Dengan luas dan terpisah-pisahannya wilayah Maluku tidak mungkin dapat dicover secara fisik melalui gelar kekuatan pada pos-pos pengamanan perbatasan di sepanjang *boundary*, namun dengan memanfaatkan perkembangan Iptek dan sistem transportasi pengawasan perbatasan dapat lebih dioptimalkan. Ilmu pengetahuan dan teknologi serta sistem transportasi merupakan bagian dari kekuatan Ketahanan Nasional.

Pentingnya tulisan ini ditinjau dari manfaat teoritis diharapkan akan bermanfaat bagi pengembangan keilmuan serta memberikan pemahaman lebih dalam lagi mengenai konsepsi ketahanan wilayah perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar dalam rangka memperkuat ketahanan nasional, sedangkan dari sudut manfaat praktis khususnya bagi pemerintah daerah kabupaten kepulauan Tanimbar dan Kodim 1507/Saumlaki hasil pemikiran dari tulisan ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan dalam perencanaan pembangunan serta dapat meningkatkan sinergitas antara pemerintah daerah dan Kodim



1507/Saumlaki dalam menyusun rencana tata ruang wilayah. Mengalir dari pemikiran diatas, maka penting untuk diteliti **"Implementasi Ketahanan Wilayah Perbatasan dan Pulau-Pulau Kecil Terluar dalam rangka Menegakkan Kedaulatan Negara"** dengan lokus penelitian di wilayah 1507/Saumlaki Kabupaten Kabupaten Tanimbar, Maluku yang berbatasan langsung dengan Negara Timor Leste dan Australia. Ada beberapa tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan penelitian ini yaitu sebagai berikut : Dapat meningkatkan pembangunan wilayah perbatasan dalam rangka menunjang ketahanan wilayah dengan melaksanakan pembangunan secara terpadu antar setiap komponen baik supra struktur, infra sutruktur maupun sub struktur dengan metode kerjasama, edukasi, pembinaan, regulasi/deregulasi, sosialisasi, dan koordinasi yang dilaksanakan secara bertahap, berkelanjutan, terencana dengan baik, terukur serta sesuai dengan skala prioritas meliputi pembangunan peningkatan rencana tata ruang, penetapan batas negara, pembangunan sumber daya manusia dan pembangunan sarana dan prasarana, melaksanakan pendataan dan pemerataan penduduk di wilayah perbatasan dan pulau-pulau terdepan, mendata potensi sumber daya alam yang terkandung didalamnya, melakukan pembinaan mental masyarakat berkaitan dengan masuknya ideologi asing yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

METODE

Penulisan penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Saryono (2010) penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang menggambarkan atau melukiskan objek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Untuk teknik analisa data menggunakan metode analisis SWOT. Yang dimaksud dengan analisis SWOT adalah suatu cara menganalisis faktor-faktor internal dan eksternal menjadi langkah-langkah strategi dalam pengoptimalan usaha yang lebih menguntungkan. Dalam analisis faktor-faktor internal dan eksternal akan ditentukan aspek-aspek yang menjadi kekuatan (*Strengths*), kelemahan (*Weakness*), peluang (*Opportunities*), dan yang menjadi ancaman (*Treatment*). Dengan begitu akan dapat ditentukan berbagai kemungkinan alternative strategi yang dapat dijalankan. Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penulisan Taskap ini adalah pendekatan studi kepustakaan. Yang dimaksud dengan studi kepustakaan ialah segala usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan atau sedang diteliti. Informasi itu dapat diperoleh dari buku-buku ilmiah, laporan penelitian, karangan-karangan ilmiah, tesis dan disertasi, peraturan-peraturan, ketetapan-ketetapan, buku tahunan, ensiklopedia dan sumber-sumber tertulis baik tercetak maupun elektronik lain.

Geopolitik secara etimologi berasal dari dari kata *geo* (bahasa Yunani) yang berarti bumi yang menjadi wilayah hidup, sedangkan politik berasal dari kata *polis* yang berarti kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri atau negara dan teia yang berarti urusan (politik) bermakna kepentingan umum warga negara suatu bangsa, dengan kata lain geopolitik dimaknai sebagai ilmu penyelenggaraan negara yang setiap kebijakannya dikaitkan dengan masalah geografi wilayah atau tempat tinggal suatu bangsa. Dalam perkembangan pemikiran tentang geopolitik, telah muncul banyak definisi dengan beraneka ruang lingkup, pembatasan dan lain sebagainya yang dapat memberikan pemahaman yang berlainan. Teori Geopolitik menurut Sir Walter Raleigh mengatakan "siapa yang menguasai laut akan menguasai perdagangan dunia dan akhirnya akan menguasai dunia". Alfred T. Mahan mengatakan "laut untuk kehidupan, sumber daya alam banyak terdapat di laut. Oleh karena itu, harus dibangun armada laut yang kuat untuk menjaganya".

Menurut Presiden Soekarno dalam amanatnya pada peresmian Lembaga Pertahanan Nasional di Istana Negara pada tanggal 20 Mei 1965 yang memberikan definisi *geopolitik adalah pengetahuan keadaan, pengetahuan segala sesuatu berhubungan dengan geografische constellatie sesuatu negara*. Penelitian labih lanjut tentang kaitan antara manusia dengan alam sekitarnya menuntun Ratzel pada kesimpulan bahwa ruang merupakan faktorr penting dalam perjuangan manusia memenuhi kebutuhan hidup. Setiap negara yang menegara, menurut Ratzel haruslah memiliki konsep ruang, dimana batas wilayah kedaulatan negara (*boundary*) amatlah penting didalam dinamika hubungan antara negara, karena batas negara sering menjadi penyebab konflik terbuka. Kenyataan dilapangan membuktikan bahwa *boundary* tidak selamanya ditaati oleh penduduk perbatasan yang dengan seenaknya mengadakan lintas batas untuk mengunjungi sanak-keluarga di seberang *boundary* atau saling berdagang secara bebas. Interaksi antar penduduk dua negara, atau interaksi dinamis antara dua budaya dapat membentuk satu batas semu atau *frontier* yang berbeda letaknya secara geografis dengan *boundary*. Berdasarkan berbagai pendapat di atas tersebut dapat diketahui bahwa pengertian implementasi merupakan suatu proses yang berkaitan dengan kebijakan dan program-program yang akan



diterapkan oleh suatu organisasi atau institusi, khususnya yang berkaitan dengan institusi negara dan menyertakan sarana dan prasarana untuk mendukung program-program yang akan dijalankan tersebut

Rumusan ketahanan nasional pertama kalinya dicetuskan pada tahun 1968 oleh Lembaga Pertahanan Nasional (yang di kemudian hari berubah menjadi Lembaga Ketahanan Nasional). Menurut pencetusnya, ketahanan nasional adalah keuletan dan daya tahan dalam menghadapi segala kekuatan, baik yang datang dari luar maupun dari dalam, yang langsung ataupun tidak langsung membahayakan kelangsungan negara dan bangsa Indonesia. Menghadap proses menuju tatanan dunia baru, maka ketahanan nasional harus mampu menjamin identitas dan integritas nasional, eksistensi bangsa Indonesia dalam pencapaian tujuan nasional dan cita-cita nasional seperti yang ditegaskan oleh Budisantoso.S (1996) yaitu perlunya kesamaan pola-pikir, pola sikap, dan pola tindak untuk mencapai karsa, yaitu cita-cita nasional, tujuan nasional, tujuan pembangunan nasional, sasaran pembangunan nasional dan kepentingan nasional.

Abdulkadir Besar (2002) mendefinisikan ketahanan nasional sebagai “kondisi dinamik suatu bangsa, berisi keuletan dan ketangguhan, yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional melalui interaksi gatra alamiah dan gatra sosial yang secara hirarki-berturutan di bawah kendali gatra politik, gatra ideologi; demokratik, dan kultur, dalam memajukan kesejahteraan bangsa, dan mengatasi tantangan, ancaman, hambatan, serta gangguan, baik yang datang dari luar maupun dari dalam yang langsung maupun tidak langsung membahayakan integritas, identitas, serta kelangsungan hidup bangsa dan negara.”

Para penggagas konsepsi ketahanan nasional dalam usahanya mengidentifikasi aspek-aspek ketahanan nasional menggunakan metode “menggali diri sendiri” yang artinya mendalami dan menyelami keadaan seluruh tumpah darah Indonesia dan pengalaman segenap bangsa Indonesia di waktu lampau, guna dipadukan dengan situasi dan kondisi sekarang, untuk mencapai cita-cita di hari depan. Penerapan metode tersebut menghasilkan temuan bahwa unsur alamiah tumpah darah Indonesia adalah letak kedudukan (posisi) Indonesia, keadaan dan kekayaan alam Indonesia dan keadaan dan kemampuan penduduk Indonesia. Bila dibanding dengan sembilan elemen konstitutif dari “*national power*” yang dikemukakan oleh Morgenthau, tiga di antaranya adalah geografi, sumber daya nasional, dan penduduk, maka ketiga gatra alamiah yang diidentifikasi oleh Lemhanas adalah sama, setidaknya berpadanan dengan hasil analisis Morgenthau.

Dalam fungsinya sebagai doktrin, ketahanan nasional merupakan cara terbaik yang ada, guna mengimplementasikan pendekatan kesejahteraan dan keamanan yang secara luas dan mendalam diyakini kebenarannya oleh bangsa Indonesia dan diajarkan serta disebarluaskan untuk dijadikan pedoman dalam memenuhi tuntutan perkembangan lingkungan demi kelangsungan hidup dan perkembangan kehidupan bangsa. Sebagai metode pemecahan persoalan, ketahanan nasional merupakan metode yang berwujud sebagai satuan fungsional dari aspek-aspek fisik dan aspek-aspek abstrak, guna memecahkan persoalan-persoalan nasional demi kelangsungan hidup dan perkembangan kehidupan bangsa Indonesia. Dalam kaitannya dengan penelitian ini, ketahanan nasional dipergunakan sebagai kondisi yang mencerminkan totalitas dan integrasi dari tiap-tiap aspek kehidupan bangsa yang keberadaannya dipengaruhi oleh berbagai faktor atau unsur kehidupan sebagai metode untuk memecahkan persoalan yang berkenaan dengan masalah penelitian ini. Secara ilmiah maka konsepsi ketahanan nasional ini telah memberikan definisi ontologis bagi ketahanan nasional, yang menjadi salah satu landasan pengukuhannya sebagai salah satu cabang keilmuan. Mengingat kondisi nyata tata kehidupan nasional amat kompleks, maka untuk memahami dan menganalisa kondisi dinamik ketahanan nasional, menurut Sunardi (1997) diperlukan dua jenis model, yaitu model makro dan model mikro. Model makro ketahanan nasional ditujukan untuk menganalisis kondisi dinamik tata kehidupan nasional pada lingkup negara sedangkan model mikro digunakan pada lingkup sub-negara atau sub-nasional. Melalui analisa mikro dimungkinkan untuk mengadakan kajian tentang ketahanan individu, ketahanan wilayah, ketahanan sektor dan sebagainya.

PEMBAHASAN

Kondisi wilayah perbatasan saat ini yang sangat memprihatinkan terutama ditinjau dari hasil pembangunan wilayah perbatasan yang sudah dicapai selama ini, tanpa mengurangi arti pembangunan wilayah perbatasan tersebut, dimana daerah perbatasan saat ini masih menjadi serambi belakang dari negara kita. Hal ini berbanding terbalik dengan negara-negara tetangga dimana daerah perbatasan dari negaranya mendapat prioritas dalam pembangunan di negaranya dan dijadikan sebagai serambi depan dari negaranya. Dari 10 negara yang berbatasan laut dengan wilayah Indonesia, Kabupaten Kepulauan Tanimbar merupakan salah satu wilayah Indonesia yang berbatasan langsung dengan negara Filipina.



Dalam menganalisis data – data yang terkumpul, menggunakan analisis SWOT (Strengthness, Weakness, Opportunities, Threatment). Konsep dasar pendekatan SWOT ini yaitu terlebih dahulu mengenal kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman terhadap ketahanan wilayah perbatasan dan pulau-pulau terluar Kabupaten Kepulauan Talaud sehingga dapat diketahui masalah yang dihadapi, bagaimana mencapainya serta tindakan yang perlu dilakukan untuk memaksimalkan kekuatan dan merebut peluang yang ada serta mengatasi kelemahan dan ancaman yang dihadapi. Tujuan penggunaan metode analisis SWOT adalah untuk menentukan strategi-strategi yang tepat dalam mendukung pembangunan wilayah perbatasan dan pulau-pulau terluar sehingga wilayah tersebut dapat menjadi beranda terdepan dari NKRI. Kondisi Nyata Pembangunan Ketahanan Wilayah Perbatasan dan Pulau-pulau Terdepan saat ini. Dari deskripsi analisis data tersebut, langkah selanjutnya menentukan faktor-faktor dominan yang berpengaruh baik positif maupun negatif terhadap Ketahanan Wilayah. Setelah ditemukan faktor-faktor dominan kemudian di bagi kedalam diagram analisis SWOT (Strengthness, Weakness, Opportunities, Threatment).

Tabel. 2
Analisis SWOT

SWOT	Strength	Weakness
Opportunity	STRATEGI S-O Menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang	STRATEGI W-O Menciptakan strategi yang meminim kelemahan untuk memanfaatkan peluang
Threat	STRATEGI S-T Menciptakan strategi yang menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman	STRATEGI W-T Menciptakan strategi yang meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman

Prosedur pemecahan masalah menggunakan analisis SWOT yang terdiri dari analisis internal dan eksternal, digunakan untuk menentukan dan menganalisis kondisi saat ini ketahanan wilayah perbatasan Kabupaten Kepulauan Talaud yang dimaksud di atas, karena faktor-faktor internal dan eksternal di dalam kualitas ketahanan wilayah perbatasan dan pulau pulau terluar memiliki tingkat kohesi dan kombinasi yang tinggi untuk saling mempengaruhi.

Permasalahan Kondisi Ketahanan Wilayah Perbatasan dan Pulau-Pulau Terluar di Wilayah Kodim 1507/Saumlaki

No	Aspek	Permasalahan
1	Geografis	a.Daerah perbatasan sulit terjangkau
		b.Tempat Pelintas Batas illegal antara Negara
2	Demografis	a.Penyebaran Penduduk tidak merata
		b.Migrasi keluar daerah cukup tinggi
		c.Sumber daya manusia rendah
3	SDA	a.Pemasaran hasil perikanan, perkebunan dan pertanian sulit
		b.Eksploitasi sumber daya alam illegal
4	Ideologi	a.Wawasan kebangsaan masyarakat rendah
		b.Rawan terhadap masuknya ideology asing
5	Politik	a. Batas antar negara belum tuntas
		b. Penyusuna RTRW belum menyentuh wilayah perbatasan dan pulau-pulau terluar
		c. BPPD belum terbentuk
		d. Akses masyarakat ke Pemerintah Daerah dan Pusat sulit
6	Ekonomi	a.Kesejahteraan masyarakat rendah
		b.Masyarakat miskin tinggi
		c.Sarana dan Prasarana terbatas

7	Sosial Budaya	a.Mudah terpengaru budaya negara tetangga b.Lebih mudah mengakses informasi dari negara tetangga
8	Hankam	a.Garis pantai cukup panjang b.Personel Pamtas terbatas c.Rawan terhadap kejahatan transnasional d.Rawan terhadap kegiatan illegal logging, illegal fishing dan pelintas batas illegal

Wilayah perbatasan dan pulau-pulau kecil terdepan suatu negara merupakan manifestasi utama kedaulatan wilayah yang mempunyai peranan penting dalam penentuan batas wilayah kedaulatan, pemanfaatan sumber daya alam, menjaga keamanan dan integritas wilayah. Pembangunannya atau harus didekati melalui dua aspek secara berimbang, yaitu pendekatan kesejahteraan dan pendekatan keamanan. Wilayah perbatasan dan pulau-pulau kecil terdepan mempunyai nilai strategis dalam mendukung keberhasilan ketahanan wilayah. Oleh sebab itu perlu mendapatkan perhatian secara sungguh-sungguh, karena pembangunan ketahanan wilayah perbatasan saat ini masih sangat jauh dari harapan. Kesalahan orientasi pembangunan selama ini adalah pembangunan yang disentralisasi di pusat-pusat pemerintahan dan ekonomi di daerah perkotaan, sedangkan pembangunan di wilayah perbatasan dengan negara lain dan pulau-pulau terdepan kurang mendapat perhatian. Untuk mewujudkan kesatuan dan keutuhan wilayah NKRI diperlukan pembangunan kekuatan disegala bidang di semua wilayah yuridiksi Indonesia secara integral, termasuk wilayah perbatasan dan pulau-pulau terdepan yang selama ini kurang tersentuh. Pembangunan di ketahanan wilayah perbatasan mempunyai makna penting, mengingat wilayah perbatasan dapat dijadikan sabuk pengaman yang berada di posisi paling depan wilayah Indonesia dalam mengamankan banyak kepentingan Indonesia.

Penanganan wilayah perbatasan dan pulau-pulau terdepan, pada hakekatnya merupakan bagian dari upaya perwujudan ruang wilayah nusantara sebagai satu kesatuan geografi, politik, ekonomi, social budaya dan pertahanan yang bulat dan utuh. Dengan terbangunnya ketahanan wilayah perbatasan dan pulau-pulau terdepan tentunya akan meningkatkan ketahanan nasional. Namun kondisi saat ini ketahanan wilayah perbatasan saat ini masih sangat mengkhawatirkan bila ditinjau dari geografi, demografi dan kondisi social masyarakat yang meliputi: Dilihat dari Kondisi Geografi, wilayah perbatasan negara di kabupaten kepulauan Talaud memiliki posisi strategis karena berada di ujung utara yang berbatasan dengan negara lain, namun posisi strategis ini belum dapat di manfaatkan secara maksimal oleh pemerintah. Selain permasalahan Batas Negara, wilayah perbatasan di Kabupaten Tanimbar sangat memprihatinkan, karena belum tersentuh dengan pembangunan. Menurut Samuel Lorutuhun, warga Tanimbar, menjelaskan bahwa beberapa desa di Kabupaten Kepulauan Tanimbar memang sama sekali belum tersentu pembangunan, sehingga memang membutuhkan perhatian pemerintah. Untuk mencapai Ibu Kota Kabupaten Kepulauan Tanimbar, P. Larat dan P. Selaru dari Kota Ambon sebagai Ibukota Propinsi, harus menempuh perjalanan ± 25 Jam dengan menggunakan Kapal Laut. Wilayah perbatasan Indonesia juga sangat rawan terhadap pelintas batas illegal, terutama di pulau pulau terluar baik yang berpenduduk maupun tidak berpenduduk menjadi tempat persinggahan kelompok-kelompok teroris. Pada saat dilaksanakan operasi Intelijen dan Operasi territorial Kodam XV/Ptm tahun 2018-2021 di beberapa daerah ditemukan beberapa pucuk senjata baik laras panjang maupun laras pendek. Dari aspek demografi, dari data dan fakta di atas terlihat bahwa sumber daya manusia pada umumnya masyarakat Kabupaten Kepulauan masih sangat terkebelakang bila dibandingkan dengan kabupaten lain di Provinsi Maluku. Rata-rata lama sekolah masih dibawah rata-rata Provinsi Maluku sebesar 8,8 tahun, sedangkan permasalahan kesehatan, secara berlahan mulai ada perubahan kearah perbaikan baik dari aspek pelayanan maupun sarana dan prasarana kesehatan. Untuk penyebaran penduduk masih tidak merata, terutama di beberapa pulau yang tidak berpenduduk. Masyarakat yang berada di wilayah perbatasan dengan keterbatasan sarana dan tingkat kesejahteraan rendah berusaha untuk keluar dari kampungnya dan mencari pekerjaan di Kota atau ke wilayah negara Timur Leste.

Dilihat dari kondisi ideologi politik, dengan belum adanya kesepakatan batas negara di laut antara Indonesia dan Australia dan Timur Leste sering terjadi konflik kepentingan dalam mengelolah sumber daya alam laut baik perikanan maupun mineral didalamnya. Rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat serta kurangnya perhatian pemerintah dalam memberikan pelayanan hak dasar pendidikan, kesehatan dan pelayanan



dasar lainnya telah merubah sikap dan pola hidup masyarakat yang cenderung beradaptasi ke negara tetangga. Kondisi seperti ini dapat melemahkan ketahanan wilayah perbatasan pada aspek ideologi dan politik yang pada gilirannya dapat mempengaruhi ketahanan nasional. Kondisi ini belum didukung oleh pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar dalam penyusunan program kerja dan anggaran dimana pembangunan di wilayah perbatasan sering terabaikan karena belum adanya Badan Pengelolaan Perbatasan dalam Struktur Organisasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar sesuai dengan Peraturan Presiden RI Nomor 12 tahun 2010 yang merupakan implementasi dari UU Nomor 43 tahun 2008. Kabupaten Kepulauan Tanimbar merupakan salah satu kabupaten yang memiliki pulau-pulau kecil terluar, dimana pembangunan pulau-pulau terluar telah menjadi isu strategis level nasional. Pulau-pulau terluar Indonesia memiliki potensi sumberdaya perikanan yang tinggi. Hal ini menjadikan Kepulauan Tanimbar menjadi salah satu wilayah dengan kepentingan strategis nasional yang mendukung peningkatan ketahanan nasional dan citra negara. Dengan potensi kelautan dan perikanan yang dimiliki, pengembangan perekonomian Kabupaten Kepulauan Talaud perlu dilakukan guna menunjang tercapainya tujuan kepentingan strategis nasional. Salah satu strategi dalam pengembangan perekonomian tersebut adalah melalui implementasi Pembangunan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (PSKPT) di Kabupaten Kepulauan Tanimbar.

Dilihat dari kondisi ekonomi, masyarakat perbatasan dengan tingkat kesejahteraan yang rendah hidup di daerah terpencil dan terisolir selalu akan berusaha untuk mendapat kehidupan yang lebih baik. Disisi lain tingkat kesejahteraan masyarakat negara tetangga jauh lebih baik sehingga mereka akan beorientasi ke negara tetangga. Dalam kondisi yang demikian selain akan terjadi pelintas batas ilegal juga dapat terjadi masyarakat perbatasan dipengaruhi untuk melakukan kegiatan yang melanggar hukum seperti pencurian kekayaan alam, perdagangan ilegal, dan penyelundupan. Apabila ini terjadi maka ketahanan wilayah perbatasan pada aspek ekonomi belum dapat menunjang terwujudnya ketahanan nasional. Dilihat dari kondisi sosial budaya, melunturnya wawasan kebangsaan, motivasi dan rasa nasionalisme sehingga mereka mudah terpengaruh dengan adat istiadat dan budaya negara tetangga. Selain itu dengan tingkat pendidikan yang rendah, dan hidup dalam kemiskinan akan lebih memudahkan mereka terpengaruh dengan kebiasaan dan pola hidup masyarakat negara tetangga. Apabila hal ini terjadi maka ketahanan wilayah perbatasan pada aspek sosial budaya belum dapat menunjang terwujudnya ketahanan nasional. Dilihat dari kondisi Hankam, daerah perbatasan dengan letaknya yang terpencil dan terisolir serta tidak didukung dengan sarana prasarana transportasi, telekomunikasi dan informasi yang memadai untuk melaksanakan tugas pengawasan dan pengamanan akan sangat rawan dan dapat memberi peluang terjadinya berbagai tindakan dan kegiatan illegal yang melanggar hukum. Kegiatan pelanggaran hukum seperti gerakan separatis dan terorisme masih sering terjadi, juga pencurian kekayaan alam, penyeundupan, perdagangan senjata dan sebagainya merupakan indikasi lemahnya kondisi wilayah bidang Hankam di daerah yang dapat melemahkan ketahanan nasional serta mengancam kedaulatan dan keutuhan negara.

Permasalahan krusial lainnya di wilayah perbatasan Indonesia dan Timur Leste dan Australia adalah belum adanya kesepakatan tentang perbatasan negara di laut.

Tabel. 4
Faktor-Faktor Dominan yang berpengaruh Terhadap
Kondisi Aktual Ketahanan Wilayah Kodim 1312/Talaud

No	Faktor	Komponen
	Internal	
1	Strength (S)	a.Adanya Komitmen Pemerintah b.Binter Kodim 1312/Talaud c.Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Alam d.Adanya Satgas Pamtas
2	Weakness	a.Belum tersusunnya RTRW Perbatasan Kab Talaud b.Terbatasnya Personel Pamtas dan Aparat Teritorial c.Belum terbentuk BPP Wil Talaud d.Rendahnya SDM Masyarakat Talaud e.Terbatasnya Sarpras di Wilayah Perbatasan f. Belum ada Satpur di wilayah Perbatasan.

		g. Belum diberdayakan Aparat Teritorial yang ada di wilayah perbatasan.
	Eksternal	
3	Opportunity	a. Letak geografis yang strategis. b. Adanya Permendagri ttg Pembentukan BPPD. c. Prioritas Gelar Satuan TNI di Wilayah Perbatasan
4	Threat	a. Transnasional Crime b. Pelintas Batas Ilegal c. Teroris, Sepataris d. Illegal Fishing, Illegal Logging

Dari factor-faktor dominan yang berpengaruh terhadap ketahanan wilayah perbatasan dan pulau-pulau kecil terliar di atas, dapat disimpulkan beberapa permasalahan yang perlu menjadi perhatian yaitu:

- a. Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah perbatasan belum diatur dengan baik.
- b. Terbatasnya personel pengamanan perbatasan dan aparat teritorial yang digelar di Kodim 1507/Saumlaki.
- c. Belum terbentuknya Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud.
- d. Sumber daya manusia masih sangat tertinggal dibandingkan dengan wilayah lain di Provinsi Maluku.
- e. Sarana dan Prasarana di wilayah Perbatasan dan Pulau-pulau terluar masih sangat terbatas, khususnya transportasi dan komunikasi.
- f. Belum tergelarnya Satuan Tempur Organik Kodam XV/Pattimura di wilayah Kabupaten Kepulauan Tanimbar dalam membantu pengamanan wilayah perbatasan dari ancaman transnasional crime, pelintas batas illegal, teroris, dan berbagai tindakan illegal.
- g. Belum diberdayakan aparat teritorial yang ada di wilayah perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar dalam membantu pemerintah daerah dalam membangun wilayah perbatasan.

Kondisi yang terjadi di wilayah perbatasan Kodim 1507/Saumlaki sangat dipengaruhi oleh faktor yang berbeda seperti faktor geografi, ketersediaan sumber daya manusia dan sumber daya alam, kondisi sosial, ekonomi, politik dan budaya serta tingkat kesejahteraan masyarakat negara tetangga. Analisis dari masing-masing permasalahan tersebut sebagai berikut:

- a. Tata ruang di wilayah perbatasan saat ini belum diatur dengan baik, kondisi ini terjadi karena pembangunan yang dilakukan di wilayah perbatasan masih sering dilakukan tanpa perencanaan tata ruang dan tidak mempertimbangkan pembangunan yang berkelanjutan. Keinginan untuk memperoleh keuntungan ekonomi jangka pendek sering menimbulkan keinginan untuk mengeksploitasi sumber daya alam di wilayah perbatasan secara berlebihan sehingga menurunkan kualitas dan kuantitas sumber daya alam yang ada. Selain itu sering terjadi konflik pemanfaatan ruang untuk kepentingan sekelompok orang yang berkuasa dengan mengabaikan kepentingan yang lebih besar. Penyebab utama terjadinya permasalahan tersebut adalah belum tepatnya kompetensi sumber daya manusia dalam bidang pengelolaan penata ruang, rendahnya kualitas dari rencana tata ruang, dan dalam pembuatan rencana tata ruang belum mengacu pada peraturan dan perundang-undangan yang mengatur penataan ruang sebagai payung hukum kebijakan pemanfaatan ruang bagi semua sektor serta lemahnya penerapan hukum berkenaan dengan pemanfaatan ruang dan penegakan hukum terhadap pelanggaran berkenaan dengan pemanfaatan ruang.
- b. Pada umumnya wilayah perbatasan dan pulau-pulau terdepan, akses pelayanan pendidikan, kesehatan sulit diperoleh, disamping itu jumlah tenaga pendidik dan tenaga kesehatan sangat minim. Hal itu terlihat dari angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah masyarakat perbatasan dibawah rata-rata propinsi. Demikian juga tingkat kesejahteraan masyarakat jauh tertinggal dari daerah lain, dimana berdasarkan jumlah dan persentasi penduduk miskin di wilayah perbatasan menunjukan persentasi tertinggi dibandingkan dengan daerah lain Sulawesi Utara. Tingkat kesejahteraan masyarakat perbatasan yang memprihatinkan telah merubah sikap dan pola hidup mereka untuk sering meninggalkan daerahnya mencari kehidupan yang lebih layak. Selain itu dengan tingkat pendidikan yang rendah mereka sangat mudah terpengaruh dengan kemajuan dan perkembangan yang dimiliki negara tetangga sehingga kondisi ini membuat mereka sulit untuk diberdayakan oleh pemerintah sendiri. Karena seringnya mereka meninggalkan desanya ke negara tetangga maka hal ini telah mempengaruhi wawasan kebangsaan

mereka, melunturkan motivasi dan rasa nasionalisme serta tanggung jawab mereka sebagai warga negara Indonesia. Kondisi ini telah memberi peluang pemanfaatan daerah perbatasan oleh pihak tertentu dalam berbagai kegiatan ilegal yang melanggar hukum yang pada akhirnya memberikan dampak negatif terhadap upaya pengawasan dan pengamanan daerah perbatasan.

- c. Sebagai akibat dari sarana dan prasarana komunikasi, transportasi dan Informasi di daerah perbatasan yang sangat minim, maka pengembangan daerah tersebut dirasakan terhambat. Dengan kemampuan teknologi yang relatif lebih maju dan perencanaan yang lebih baik, maka negara tetangga telah membangun dan mengelola sarana serta prasarana komunikasi dan informasi yang sangat baik di daerah perbatasan. Hal ini membuat masyarakat perbatasan lebih sering mengikuti dan memperoleh informasi melalui media massa ataupun siaran radio dan televisi negara tetangga dibandingkan dengan mendapat informasi dari pemerintah sendiri. Disisi lain sarana dan prasarana transportasi laut juga sangat terbatas. Akibat minimnya sarana dan prasarana transportasi yang dimiliki, maka daerah perbatasan menjadi terisolasi sehingga beban biaya menjadi sangat tinggi untuk mengembangkan perekonomian di daerah perbatasan. Selain itu keterisolasian daerah tersebut dari pusat-pusat perekonomian di daerah juga telah mengakibatkan tingkat kehidupan masyarakat perbatasan sangat memprihatinkan dan berada dalam keadaan miskin. Kemiskinan dan tingkat kesejahteraan yang rendah telah memicu masyarakat untuk menjadi pelintas batas maupun melakukan kegiatan ilegal. Hal tersebut dilakukan mereka untuk mencari kehidupan yang lebih layak karena selain untuk mendatangi pusat perekonomian di negara sendiri sangat jauh serta sulit terjangkau, tingkat perekonomian negara tetangga jauh lebih baik. Disisi lain, pemerintah daerah masih berorientasi ke dalam untuk membangun sentra-sentra perekonomian di kota tanpa memperhatikan ataupun memprioritaskan pembangunan kepada masyarakat di perbatasan. Selain itu, faktor jarak ke negara tetangga yang sangat dekat membuat masyarakat perbatasan lebih sering mengikuti perkembangan negara tetangga dengan jelas dibandingkan negara sendiri, yang akhirnya mempengaruhi sikap dan pola hidup serta rasa nasionalisme mereka dan dapat memberikan dampak negatif dalam upaya untuk meningkatkan Ketahanan Nasional.
- d. Mendekatkan satuan kewilayahan ke daerah perbatasan. Seiring dengan pembangunan aspek kesejahteraan yang ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, maka dislokasi satuan-satuan komando kewilayahan juga didekatkan ke daerah perbatasan dengan negara tetangga. Markas Komando satuan setingkat Kodim dan Koramil maupun Babinsa, yang saat ini berada jauh dari daerah perbatasan dipindahkan (dislokasi) ke daerah perbatasan. Secara psikologis pemindahan ini akan memberikan efek kepada peningkatan ketahanan masyarakat di daerah perbatasan. Keuntungan lain adalah pembinaan dan pemberdayaan wilayah pertahanan akan difokuskan di daerah perbatasan sehingga ketahanan wilayah perbatasan akan lebih kuat. Secara harfiah pemindahan ini berarti mendekatkan kekuatan sendiri kepada hakekat ancaman khususnya dari luar negeri.
- e. Satuan TNI yang ada di wilayah perbatasan negara Indonesia dan Filipina, selain satuan kewilayahan dalam hal ini Kodim 1507/Saumlaki, Kodam XV/Pattimura juga mengirimkan Satuan Tugas (Satgas) pengamanan perbatasan dan pulau-pulau terluar disebar di wilayah perbatasan dan pulau-pulau terluar. Selain melaksanakan tugas pengamanan perbatasan, Satgas ini yang ditempatkan dalam beberapa pos perbatasan dapat diberdayakan untuk membantu pemerintah daerah maupun masyarakat dalam meningkatkan kualitas hidup. Keberadaan satuan tugas ini dapat melaksanakan pembinaan territorial terhadap masyarakat yang ada wilayah perbatasan dan pulau-pulau yang sulit dijangkau. Agar pembangunan wilayah perbatasan dan pulau-pulau terluar di wilayah Kodim 1507/Saumlaki perlu strategi yang tepat dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam yang melimpah untuk kepentingan masyarakat melalui perencanaan pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat dengan tetap memperhatikan faktor ancaman yang kemungkinan muncul.

Implementasi Pembangunan Ketahanan Wilayah Perbatasan dan Pulau-pulau Terdepan guna mendukung Pertahanan Negara yang kuat. Dari pembahasan sebelumnya terlihat bahwa pada umumnya kondisi sosial masyarakat di wilayah perbatasan dan pulau-pulau terdepan sangat memprihatinkan bila dibandingkan dengan kondisi masyarakat Indonesia lainnya. Kondisi nyata menunjukkan bahwa kesenjangan sosial yang ada mencakup hampir seluruh aspek kehidupan sosial masyarakat. Yang dirasakan sangat menonjol dari kesenjangan tersebut adalah masyarakat perbatasan pada umumnya hidup dalam kemiskinan, kurang berpendidikan, kurang mendapat pelayanan kesehatan serta pelayanan hak dasar lainnya dari pemerintah. Kondisi ini merupakan akibat dari penerapan kebijakan pemerintah dalam mengembangkan wilayah



perbatasan dengan berpedoman kepada kebijakan pembangunan wilayah yang cenderung berorientasi *inward looking* dengan menggunakan pendekatan melalui peningkatan keamanan (*security approach*). Akibatnya baik pemerintah pusat maupun daerah kurang memperhatikan dan memprioritaskan pembangunan di daerah perbatasan dan menganggap daerah tersebut merupakan halaman belakang dari kegiatan pembangunan negara yang dapat diprioritaskan kemudian. Kondisi yang sama juga dialami oleh masyarakat perbatasan dan pulau-pulau terdepan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan diperparah lagi dengan lokasinya yang sangat terisolir serta sulit terjangkau. Disisi lain sarana dan prasarana transportasi baik laut, udara dan darat sangat minim sehingga masyarakat merasa termajinalkan dan tidak mendapat perhatian dari pemerintah pusat dan daerah. Masyarakat mengalami kesulitan untuk berhubungan dan berkomunikasi dengan daerah-daerah lainnya di Indonesia. Kondisi diatas menyebabkan masyarakat perbatasan mempunyai hubungan secara psikologis, sosiologis dan bahkan politis lebih dekat dengan masyarakat negara tetangga di banding dengan masyarakat Indonesia. Dengan melihat kenyataan yang ada maka pembangunan wilayah perbatasan dirasakan akan lebih efektif dan efisien bila dilaksanakan melalui pemberdayaan masyarakat setempat yang didasari dengan motivasi dan rasa nasionalisme yang tinggi serta difasilitasi oleh pemerintah dengan memperhatikan kelestarian dan keseimbangan lingkungan, nilai-nilai budaya setempat dan keamanan dalam mengelola sumber daya alam yang tersedia. Untuk mendukung hal tersebut tentunya dibutuhkan suatu pemikiran dan perencanaan yang sinergi, bertahap dan berkelanjutan mulai dari penyusunan kebijakan dan strategi serta upaya-upaya yang harus dilaksanakan didukung oleh metoda yang telah dipersiapkan.

Pembangunan wilayah perbatasan merupakan bagian dari pembangunan nasional secara menyeluruh dan ditunjukan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, oleh karena itu pengelolaan dan pemanfaatan faktor geografi, demografi dan sumber daya alam harus dilakukan secara terencana, terintegrasi dan berkelanjutan yang sesuai dengan daya dukung lingkungan. Kesenjangan sosial yang terjadi di kawasan perbatasan seperti kualitas sumber daya manusia yang rendah, kemiskinan masih sangat tinggi, tingkat kesehatan yang rendah apabila tidak segera ditangani secara bijaksana, akan berdampak pada lemahnya semangat persatuan dan kesatuan bangsa, serta keutuhan wilayah nasional Indonesia sehingga tidak ada pilihan lain selain memberi prioritas utama terhadap pembangunan wilayah perbatasan. Keberhasilan terhadap pembangunan wilayah perbatasan dengan mengatasi berbagai permasalahan yang terjadi akan dapat memperkokoh ketahanan nasional. Adapun konsepsi pemecahan masalah tersebut memuat kebijaksanaan, strategi yang digunakan serta beberapa upaya yang harus dilaksanakan melalui metode SWOT

Tabel. 5

Analisis SWOT Kondisi Aktual Ketahanan Wilayah Kodim 1507/Saumlaki

SW	Strength -Komitmen Pemerintah -Pembinaan Teritorial -Potensi SDA	Weakness -Belum tersusunnya RTRW Perbatasan Kab Talaud -Rendahnya SDM
OT	-Satgas Pamtas	-Belum terbentuk BPP Wil Talaud
Opportunity -Prosperity approach -Security approach	STRATEGI S-O Menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang	STRATEGI W-O Menciptakan strategi yang meminimalkan kelemahan untuk memanfaatkan peluang
Threat -Transnasional Criame -Pelintas Batas Ilegal -Kedaulatan Negara	STRATEGI S-T Menciptakan strategi yang menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman	STRATEGI W-T Menciptakan strategi yang meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman

Dari diagram SWOT di atas, dapat kita temukan beberapa strategi yang dapat dilakukan untuk menyusun konsep ketahanan wilayah perbatasan dan pulau-pulau terluar di wilayah Kodim 1507/Saumlaki dalam rangkan mendukung ketahanan nasional bangsa Indonesia. Strategi-strategi tersebut terurai sebagai berikut: Strategi ini dibuat berdasarkan jalan pikiran memanfaatkan seluruh kekuatan untuk merebut dan memanfaatkan peluang sebesar-besarnya. Kondisi ketahanan wilayah perbatasan dan pulau-pulau terluar menurut strategi SO: Pembinaan Teritorial di wilayah perbatasan dilaksanakan melalui pendekatan

Kesejahteraan dan Keamanan. Potensi Sumber Daya Alam dikelola untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat wilayah perbatasan. Komitmen pemerintah mengembangkan wilayah perbatasan menjadi serambi depan negara NKRI.

Satgas Pengamanan perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar TNI melaksanakan tugas menjaga perbatasan negara, mengawasi pelintas batas illegal untuk memantapkan kedaulatan negara.

Strategi ST. Strategi ini adalah strategi dalam menggunakan kekuatan yang dimiliki untuk mengatasi ancaman.

- a. Penggunaan gelar kekuatan satuan TNI dalam menghadapi ancaman Transnasional Crime dan Pelintas Batas Illegal.
- b. Adanya Komitmen Pemerintah untuk melaksanakan pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
- c. Adanya Komitmen pemerintah untuk melaksanakan pembangunan di wilayah perbatasan dan pulau-pulau terluar.
- d. Mendekatkan Satkowil ke wilayah perbatasan dan pulau-pulau terluar dalam mengatasi ancaman.

3) **Strategi WO.** Strategi ini diterapkan berdasarkan pemanfaatan peluang yang ada dengan cara meminimalkan kelemahan yang ada.

- a. Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Perbatasan dilaksanakan dengan pendekatan Kesejahteraan dan keamanan.
- b. Membangun sarana dan prasarana di wilayah perbatasan dalam rangka pengembangan daerah cepat tumbuh.
- c. Pengentasan kemiskinan untuk mencapai masyarakat yang sejahtera.
- d. Meningkatkan SDM unggul untuk mencapai masyarakat yang sejahtera.
- e. Penetapan Batas Negara untuk menjaga kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia.
- f. Pembentukan BPP Wilayah Talaud dapat mempercepat pembangunan wilayah perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar di Kabupaten Kepulauan Talaud.

4) **Strategi WT** Strategi ini didasarkan pada kegiatan usaha meminimalkan kelemahan yang ada serta menghindari ancaman.

- a. Pembangunan Sarana/Prasarana di wilayah perbatasan untuk mencegah ancaman transnasional crime.
- b. Pengentasan kemiskinan sebagai upaya mencegah terjadinya pelintas batas illegal.
- c. Penetapan batas negara untuk mencegah terjadinya transnasional crime.

Dari uraian di atas, dengan memperhatikan kondisi nyata yang dihadapi dilapangan dan harapan yang ingin diwujudkan maka implementasi strategi dalam mengembangkan wilayah perbatasan dan pulau-pulau terluar dalam rangka menunjang ketahanan nasional disusun sebagai berikut : *“Terwujudnya ketahanan wilayah perbatasan dan pulau-pulau terdepan yang aman, tertib, maju, terjaganya keutuhan wialyah dan kedaulatan negara melalui penetapan rencana tata ruang wilayah perbatasan, penetapan batas negara, peningkatan kualitas sumber daya manusia, peningkatan sarana dan prasana serta pemberdayaan wilayah pertahanan melalui peran pembinaan teritorial Kodim 1507/Saumlaki dalam rangka meningkatkan ketahanan nasional”*

Kondisi masyarakat wilayah perbatasan dan pulau pulau terdepan memiliki karakteristik yang bervariasi dan sangat berbeda antara suatu daerah dengan daerah yang lain, serta permasalahan yang dihadapipun juga berbeda sehingga dalam pengembangannya memerlukan strategi dan upaya yang juga berbeda sesuai kondisi daerah. Strategi pada dasarnya merupakan pengarahan seluruh sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan berdasarkan kebijakan yang dicanangkan. Rumusan strategi yang dibuat, harus memperhatikan akar permasalahan diwilayah perbatasan dan pulau-pulau terdepan. Untuk melaksanakan kebijaksanaan yang telah ditetapkan, maka disusun beberapa strategi antara lain sebagai berikut :

- a. Strategi 1 : Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Perbatasan. Strategi penetapan rencana tata ruang wilayah perbatasan dilaksanakan dengan tujuan untuk mendorong keterpaduan pembangunan wilayah perbatasan dalam rangka mewujudkan kehidupan sosial ekonomi masyarakat yang sejahtera, melindungi fungsi lingkungan di wilayah perbatasan serta mempercepat pembangunan kawasan melalui upaya pengembangan pertumbuhan ekonomi dan membuka keterisolasian wilayah dengan



- tetap menjaga kelestarian lingkungan dan nilai-nilai budaya. Sedangkan sasaran penetapan rencana tata ruang wilayah perbatasan ini agar terselenggaranya pemanfaatan ruang yang menjamin terwujudnya pengembangan kawasan yang sesuai dengan sumber daya alam dengan mempertimbangkan kepentingan masyarakat dan nilai kearifan lokal. Terwujudnya pengembangan system jaringan sarana dan prasarana wilayah untuk meningkatkan aksesibilitas kawasan perbatasan dan mewujudkan system jaringan sarana dan prasarana wilayah yang saling bersinergi antar negara tetangga. Terwujudnya system pemukiman yang memperhatikan kepentingan ekonomi masyarakat, pertahanan keamanan dan kelestarian lingkungan hidup.
- b. Strategi 2 : Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dibutuhkan strategi yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat wilayah perbatasan yang memiliki daya saing, maju dan mandiri untuk mencapai masyarakat yang lebih makmur dan sejahtera yang ditandai dengan meningkatnya indeks pembangunan manusia (IPM) melalui pembangunan pendidikan, kesehatan serta sarana dan prasarana lainnya. Pembangunan pendidikan dan kesehatan merupakan investasi dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia sehingga penting peranannya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menurunkan kemiskinan dan pengangguran. Pembangunan pendidikan diarahkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia untuk mendukung terwujudnya masyarakat wilayah perbatasan yang berharkat, bermartabat, berahlak mulia dan menghargai keberagaman sehingga mampu bersaing dengan wilayah lain serta dengan negara tetangga. Komitmen pemerintah terhadap pendidikan harus tercermin pada kualitas sumber daya manusia, peningkatan kualitas ilmu pengetahuan dan teknologi, serta politik anggaran yang mendukung peningkatan kualitas pendidikan. Sedangkan pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap masyarakat di wilayah perbatasan. Pembangunan kesehatan dilaksanakan melalui upaya peningkatan sarana dan prasarana kesehatan, pembiayaan kesehatan, sumber daya manusia kesehatan, obat dan perbekalan kesehatan yang disertai dengan pengawasan, pemberdayaan masyarakat dan manajemen kesehatan. Sasaran pembangunan pendidikan dan kesehatan adalah untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan.
 - c. Strategi 3 : Membangun Sarana dan Prasana. Keteringgalan, keterisolasian dan kemiskinan serta kurangnya pelayanan dasar yang dialami masyarakat perbatasan sebagai akibat dari terbatasnya sarana dan prasarana penunjang sehingga daerah mereka menjadi sulit terjangkau dari pusat pemerintahan maupun pulau induk. Selain itu ilmu pengetahuan dan teknologi yang cenderung lebih berkembang di negara tetangga telah dimanfaatkan mereka melalui pemasangan stasiun-stasiun radio dan TV, tanpa disadari telah berpengaruh terhadap sikap, pola hidup, motivasi dan rasa nasionalisme masyarakat perbatasan serta tanggung jawabnya sebagai warga negara RI. Oleh sebab itu, dibutuhkan suatu strategi yang bertujuan untuk meningkatkan sarana dan prasarana, sehingga dapat meningkatkan penerapan kebijakan pemerintah guna memperbaiki kesejahteraan dan memantapkan partisipasi serta motivasi masyarakat perbatasan sehingga mereka dapat diberdayakan dalam upaya mengembangkan wilayah perbatasan.
 - d. Strategi 4 : Mendekatkan gelar satuan TNI AD ke daerah perbatasan dan Pulau-pulau terluar. Perbatasan negara merupakan daerah yang sangat strategis karena perbatasan negara berkenaan dengan kedaulatan negara. Selain batas negara, masyarakat di wilayah perbatasan perlu mendapat perhatian yang serius karena perbatasan negara merupakan serambi depan negara. Untuk menjaga eksistensi negara baik wilayah negara maupun masyarakatnya diperlukan pembinaan yang terus menerus. Untuk itu satuan kewilayahan TNI AD perlu digelar di wilayah perbatasan dan pulau-pulau terluar, selain untuk menjaga batas negara juga dalam rangka membina kemampuan menjadi potensi pertahanan.
 - e. Strategi 5 : Pemberdayaan pos-pos pengaman TNI di daerah perbatasan. Daerah perbatasan Indonesia dengan negara lain sangat rentan terhadap kemungkinan ancaman yang mungkin datang dari luar negeri serta ancaman dari dalam negeri yang dapat memperlemah integritas negara RI. TNI AD sebagai alat pertahanan negara harus mampu menjaga wilayah perbatasan dan pulau-pulau terluar NKRI. Di wilayah perbatasan Indonesia dengan Filipinan ditempatkan Pos-pos pengamanan daerah berbatasan. Pos-pos pengamanan yang tersebar di wilayah perbatasan dan pulau-pulau terluar perlu di

berdayakan baik dalam memaksimalkan tugas pengamanan perbatasan dan pulau-pulau terluar, dapat juga digunakan untuk membantu masyarakat di sekitar wilayah perbatasan dan pulau-pulau terluar.

KESIMPULAN

Kondisi strategis negara Indonesia yang berbatasan dengan negara lain berupa perbatasan darat dan perbatasan laut membutuhkan orientasi yang tepat dalam pembangunan di segala bidang. Secara objektif pelaksanaan strategi pembangunan negara dengan negara tetangga yang berbatasan darat atau berbatasan laut membutuhkan strategi yang berbeda pula. Dari hasil analisis dan pembahasan dalam tulisan ini dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut: Kondisi yang terjadi di wilayah perbatasan sangat dipengaruhi oleh faktor yang berbeda seperti faktor geografi, ketersediaan sumber daya manusia dan sumber daya alam, kondisi sosial, ekonomi, politik dan budaya serta tingkat kesejahteraan masyarakat negara tetangga, dimana secara faktual permasalahan yang terjadi di wilayah perbatasan meliputi belum terwujudnya penyusunan rencana tata ruang wilayah perbatasan yang berpihak pada masyarakat yang tinggal di wilayah perbatasan, rendahnya sumber daya manusia serta tidak memadainya sarana dan prasarana penunjang, banyaknya pelanggaran batas negara dan pelintas batas illegal. Mereka lebih berorientasi dan cenderung menjadi pelintas batas untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan mendapatkan kesejahteraan yang lebih baik, dengan menggunakan cara dan jalan pintas yang kadang-kadang melanggar hukum. Selain itu kondisi tersebut telah berpengaruh pula terhadap semangat, motivasi dan rasa nasionalisme serta tanggung jawab mereka sebagai warga negara Indonesia. Melemahnya sikap mental dan rasa nasionalisme mereka telah dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk melakukan berbagai kegiatan ilegal yang melanggar hukum seperti pencurian sumber kekayaan alam, penyelundupan, perdagangan manusia (*human trafficking*), perdagangan narkoba dan senjata serta membantu kejahatan transnasional seperti gerakan separatis dan terorisme yang dapat melemahkan ketahanan nasional serta mengancam keutuhan serta kedaulatan NKRI. Implementasi Pembangunan Ketahanan Wilayah Perbatasan dan Pulau-pulau Terdepan guna mendukung Pertahanan Negara yang kuat. Pembangunan wilayah perbatasan merupakan bagian dari pembangunan nasional secara menyeluruh dan ditunjukkan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, oleh karena itu pengelolaan dan pemanfaatan faktor geografi, demografi dan sumber daya alam harus dilakukan secara terencana, terintegrasi dan berkelanjutan yang sesuai dengan daya dukung lingkungan. Kesenjangan sosial yang terjadi di kawasan perbatasan seperti kualitas sumber daya manusia yang rendah, kemiskinan masih sangat tinggi, tingkat kesehatan yang rendah apabila tidak segera ditangani secara bijaksana, akan berdampak pada lemahnya semangat persatuan dan kesatuan bangsa, serta keutuhan wilayah nasional Indonesia sehingga tidak ada pilihan lain selain memberi prioritas utama terhadap pembangunan wilayah perbatasan. Keberhasilan terhadap pembangunan wilayah perbatasan dengan mengatasi berbagai permasalahan yang terjadi akan dapat memperkuat ketahanan nasional. Oleh sebab itu, sejalan dengan kebijakan pemerintah yang diharapkan guna mengembangkan daerah perbatasan seperti yang telah dibahas di dalam sebelumnya, maka pembangunan wilayah perbatasan hanya dapat berhasil apabila semua permasalahan yang selama ini dirasakan menghambat penerapan kebijakan tersebut harus segera diatasi. Untuk itu diperlukan adanya konsepsi ketahanan wilayah perbatasan dan pulau-pulau terdepan yang dapat diimplementasikan dengan melibatkan peran aktif masyarakat serta adanya sinergitas antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah serta TNI dengan mengupayakan pembuatan rencana tata ruang wilayah perbatasan, penetapan batas wilayah negara, peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, peningkatan sarana dan prasarana penunjang, mendekatkan satuan-satuan TNI ke wilayah perbatasan dan memberdayakan pos-pos pengamanan perbatasan TNI dalam mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan. Sehingga diharapkan wilayah perbatasan tidak lagi menjadi daerah belakang negara dan negara lain bebas mengintervensi kedaulatan dan kewibawaan negara dengan masuk dan keluar tanpa adanya penghormatan terhadap aturan dan hukum yang berlaku di negara Indonesia. Adapun konsepsi pemecahan masalah tersebut memuat kebijaksanaan, strategi yang digunakan serta beberapa upaya yang harus dilaksanakan melalui metode tertentu yang melibatkan segenap komponen bangsa.

Daftar Pustaka

Besar, Abdulkadir. 2002. "*Redefinisi Pengertian Ketahanan Nasional*", *Suatu Usulan Konstruktif*. Jakarta : Pusat Studi Pancasila, Universitas Pancasila, Dokumen No.1,



- BPS Kabupaten Kepulauan Talaud, 2019. *Statistik Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud 2019*. Manado: CV Bahu Bahtera Indah.
- Hadiwijoyo, Suryo S. 2009. *Batas Wilayah Negara Indonesia “Dimensi, Permasalahan, dan Strategis Penanganan”* Sebuah Tinjauan Empiris dan Yuridis. Jakarta:Penerbit Gava Media.
- Koentjaraningrat. 1983. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia.
- Lemhanas. 1980. *“Bunga Rampai Ketahanan Nasional”*. (Jakarta: Ripres Utama.
- Rangkuti, Freddy. 2006. *Riset Pemasaran*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Risal, Samsul. 2009. *Defence Cooperation Agreement (DCA) RI-Singapura ditinjau dari Prespektif Ketahanan Nasional*. Jakarta: Prodi Kajian Strategik Ketahanan Nasional Press.
- Sugiyono. 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&B*. Bandung : Alfabeta.
- Sunarto, dkk, 2006. *Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi*. Yogyakarta: UNY Press.
- Sunardi, R.M. 1997. *“Teori Ketahanan Nasional”*. Jakarta: Penerbit, Hastannas.
- Tim Riset Global Future Institut. *Mengenal Geopolitik*, Melalui <http://theglobal-review.com/mengenal-geopolitik/>, (14/04/2020).

